



**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025  
KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM  
SULAWESI TENGAH**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Rakhmat Renaldy  
Jabatan : Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum Sulawesi Tengah

Selanjutnya disebut **Pihak Pertama**

Nama : Min Usihen  
Jabatan : Kepala Badan Pembinaan Hukum Nasional

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut **Pihak Kedua**

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Jakarta, 7 Januari 2025

Pihak Kedua,  
Kepala Badan Pembinaan Hukum Nasional

Min Usihen  
NIP. 196903091994032001

Pihak Pertama,  
Kepala Kantor Wilayah Sulawesi Tengah

Rakhmat Renaldy  
NIP. 197310101996031001

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025**  
**KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM SULAWESI TENGAH**  
**DENGAN KEPALA BADAN PEMBINAAN HUKUM NASIONAL**

No.	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Terwujudnya Analisis dan Evaluasi Produk Hukum di Wilayah serta Fasilitasi Perencanaan Peraturan Daerah	1. Jumlah Analisis dan Evaluasi Produk Hukum yang Dilakukan	1 Dokumen
		2. Jumlah Fasilitasi Perencanaan Peraturan Daerah	1 Dokumen
2.	Terwujudnya Pengelolaan Keanggotaan JDIHN di Wilayah	Persentase Anggota JDIHN yang Dikelola terhadap Total Anggota JDIHN di Wilayah	25 %
3.	Meningkatnya Layanan Bantuan Hukum di Wilayah	1. Persentase Layanan Bantuan Hukum Litigasi yang Diberikan terhadap Total Permohonan Layanan Bantuan Hukum Litigasi	82 %
		2. Persentase Layanan Bantuan Hukum Non Litigasi yang Diberikan terhadap Total Permohonan Layanan Bantuan Hukum Non Litigasi	80 %
4.	Meningkatnya Desa Sadar Hukum di Wilayah	Persentase Peningkatan Desa/Kelurahan Sadar Hukum yang Memenuhi Kriteria sebagai Desa/Kelurahan Binaan terhadap Total Usulan Kantor Wilayah	70 %

Kegiatan	Anggaran
<b>Program Pembentukan Regulasi</b>	<b>Rp 141.851.000,-</b>
Penyelenggaraan Fasilitasi Perencanaan, Pemantauan dan Evaluasi Produk Hukum di Wilayah	Rp 141.851.000,-
<b>Program Penegakan dan Pelayanan Hukum</b>	<b>Rp 1.936.960.000,-</b>
Penyelenggaraan Pembinaan Hukum di Wilayah	Rp 1.936.960.000,-

Jakarta, 7 Januari 2025

Pihak Kedua,  
Kepala Badan Pembinaan Hukum Nasional



Min Usihen  
NIP. 196903091994032001

Pihak Pertama,  
Kepala Kantor Wilayah Sulawesi Tengah



Rakhmat Renaldy  
NIP. 197310101996031001



**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025  
KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM  
SULAWESI TENGAH**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Rakhmat Renaldy

Jabatan : Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum Sulawesi Tengah

berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan.

Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Jakarta, 7 Januari 2025

Kepala Kantor Wilayah Sulawesi Tengah

Rakhmat Renaldy  
NIP. 197310101996031001



**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025  
KEPALA DIVISI PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN DAN PEMBINAAN HUKUM  
KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM SULAWESI TENGAH**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Sopian  
Jabatan : Kepala Divisi Peraturan Perundang-undangan dan Pembinaan Hukum  
Kantor Wilayah Sulawesi Tengah

Selanjutnya disebut **Pihak Pertama**

Nama : Rakhmat Renaldy  
Jabatan : Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum Sulawesi Tengah

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut **Pihak Kedua**

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pihak Kedua,  
Kepala Kantor Wilayah Sulawesi Tengah

Rakhmat Renaldy  
NIP. 197310101996031001

Palu, 24 Januari 2025

Pihak Pertama,  
Kepala Divisi Peraturan Perundang-  
undangan dan Pembinaan Hukum  
Kanwil Sulawesi Tengah

Sopian  
NIP. 197307211997031001

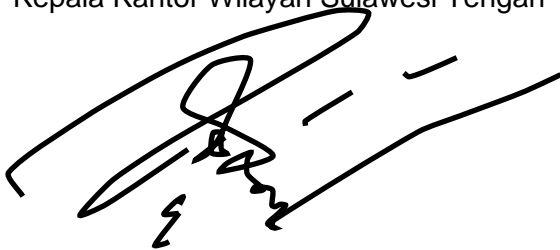
**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025**  
**KEPALA DIVISI PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN DAN PEMBINAAN HUKUM**  
**DENGAN KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM SULAWESI TENGAH**

No.	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Terfasilitasinya Rancangan Produk Hukum di Daerah	Persentase Rancangan Produk Hukum di Daerah yang Difasilitasi oleh Kantor Wilayah Kementerian Hukum	80 %
2.	Meningkatnya Pembinaan Perancang Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Peningkatan Kapasitas Pembinaan Tenaga Perancang Peraturan Perundang-undangan	11 Orang
3.	Terwujudnya Analisis dan Evaluasi Produk Hukum di Wilayah serta Fasilitasi Perencanaan Peraturan Daerah	1. Jumlah Analisis dan Evaluasi Produk Hukum yang Dilakukan	1 Dokumen
		2. Jumlah Fasilitasi Perencanaan Peraturan Daerah	1 Dokumen
4.	Terwujudnya Pengelolaan Keanggotaan JDIHN di Wilayah	Persentase Anggota JDIHN yang Dikelola terhadap Total Anggota JDIHN di Wilayah	25 %
5.	Meningkatnya Layanan Bantuan Hukum di Wilayah	1. Persentase Layanan Bantuan Hukum Litigasi yang Diberikan terhadap Total Permohonan Layanan Bantuan Hukum Litigasi	82 %
		2. Persentase Layanan Bantuan Hukum Non Litigasi yang Diberikan terhadap Total Permohonan Layanan Bantuan Hukum Non Litigasi	80 %
6.	Meningkatnya Desa Sadar Hukum di Wilayah	Persentase Peningkatan Desa/Kelurahan Sadar Hukum yang Memenuhi Kriteria sebagai Desa/Kelurahan Binaan terhadap Total Usulan Kantor Wilayah	70 %
7.	Terwujudnya kemanfaatan rekomendasi strategi kebijakan hukum di wilayah	Persentase rekomendasi strategi kebijakan hukum di wilayah yang ditindaklanjuti	80 %

Kegiatan	Anggaran
<b>Program Pembentukan Regulasi</b>	<b>Rp 703.851.000,-</b>
Penyelenggaraan Fasilitasi Pembentukan Regulasi di Wilayah	Rp 562.000.000,-
Penyelenggaraan Fasilitasi Perencanaan, Pemantauan dan Evaluasi Produk Hukum di Wilayah	Rp 141.851.000,-
<b>Program Penegakan dan Pelayanan Hukum</b>	<b>Rp 1.936.960.000,-</b>
Penyelenggaraan Pembinaan Hukum di Wilayah	Rp 1.936.960.000,-
<b>Program Dukungan Manajemen</b>	<b>Rp 430.446.000,-</b>
Analisis Strategi Kebijakan Hukum di Wilayah	Rp 430.446.000,-

Palu, 24 Januari 2025

Pihak Kedua,  
Kepala Kantor Wilayah Sulawesi Tengah



Rakhmat Renaldy  
NIP. 197310101996031001

Pihak Pertama,  
Kepala Divisi Peraturan Perundang-  
undangan dan Pembinaan Hukum  
Kanwil Sulawesi Tengah



Sopian  
NIP. 197307211997031001



**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025**  
**KEPALA DIVISI PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN DAN PEMBINAAN HUKUM**  
**KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM SULAWESI TENGAH**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Sopian  
Jabatan : Kepala Divisi Peraturan Perundang-undangan dan Pembinaan Hukum  
Kantor Wilayah Sulawesi Tengah

berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan.

Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak Kedua,  
Kepala Kantor Wilayah Sulawesi Tengah

Rakhmat Renaldy  
NIP. 197310101996031001

Palu, 24 Januari 2025

Kepala Divisi Peraturan Perundang-  
undangan dan Pembinaan Hukum  
Kanwil Sulawesi Tengah

Sopian  
NIP. 197307211997031001